

### BAB 3 PENYUSUNAN PERJANJIAN

Bab ini selain akan mencoba melihat bagaimana proses berjalannya negosiasi juga akan melihat kondisi masing-masing pihak, yaitu ASEAN dan India, dalam tiap tahap negosiasi. Penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang akan dibagi menjadi tiga tahap dan periode, yaitu: tahap perancangan FA, tahap kesepakatan secara prinsip, dan tahap penandatanganan perjanjian. Secara ringkas tahap dan alur negosiasi perdagangan barang ASEAN-India dapat dilihat dalam Gambar 3.1 di bawah ini:

**Gambar 3.1 Alur Negosiasi Perdagangan Barang ASEAN-India**



Sebelum memasuki penjabaran secara lengkap mengenai tahap negosiasi, di bawah ini adalah tabel 3.1 yang menjabarkan secara ringkas mengenai posisi awal, hasil kesepakatan dan juga faktor domestik ASEAN dan India selama proses negosiasi:

Tabel 3.1 Tahap Negosiasi ASEAN-India

Posisi Awal Masing-masing pihak		Hasil Kesepakatan	Faktor Domestik
<b>India</b>	<b>ASEAN</b>		<b>Periode 2004 – 2008</b>
<b>Periode 2004 – 2008</b>	<b>Periode 2004 – 2008</b>		<b>India:</b> Pengaruh lobi dalam negeri: internal partai dan dari partai koalisi, pengusaha dan petani India  Partai kongres cenderung sosialis dan proteksionis  Tentangan yang kuat dari partai Komunis  Partai Komunis keluar dari koalisi pada pertengahan 2008
a. ROO: <i>value added (regional value content)</i> sebesar 40% dan <i>Change in Tariff Heading</i> (CTH)	a. ROO ASEAN hanya menginginkan penerapan <i>value added</i> tanpa diberlakukannya CTH	a. ROO, keduanya sepakat untuk menetapkan nilai isi regional ( <i>regional value content</i> ) sebesar 35% ditambah dengan CTH	
b. Daftar Komoditas Pengecualian: India mengajukan sebanyak 1.414 komoditas/tariff lines	b. Daftar Komoditas Pengecualian: ASEAN menginginkan hanya sekitar 400 komoditas	b. Daftar Komoditas Pengecualian: ASEAN akhirnya menerima penawaran India dengan jumlah 489 komoditas/tariff lines.	
c. <i>Higly Sensitive Track</i> (HST) atau <i>special products</i> : Memasukkan minyak sawit mentah, minyak sawit suling, teh hitam, kopi, dan lada dengan tarif yang sangat tinggi	c. <i>Higly Sensitive Track</i> (HST) atau <i>special products</i> ASEAN menginginkan tariff untuk CPO sebesar 37,5% dan RPO 45%	c. <i>Higly Sensitive Track</i> (HST) atau <i>special products</i> CPO: 37,5% RPO: 45% Kopi: 45% Teh Hitam: 45% Lada: 50%	<b>ASEAN:</b> Singapura terus mendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk tetap melanjutkan proses negosiasi
<b>Periode 2008 – 2009</b>	<b>Periode 2008 – 2009</b>		<b>Periode 2008 – 2009</b>
d. Penurunan tariff: penurunan tarif dalam jangka waktu 12 bulan sebanyak satu kali saja. Dimulai tahun 2010	d. Penurunan tariff: penurunan tarif dalam dua tahap. Penurunan tarif barang sebanyak dua kali dalam jangka waktu dua belas (12) bulan. Dimulai tahun 2009.	d. Tarif turun sebanyak satu kali dalam 12 bulan dan dimulai tahun 2010	<b>India:</b> April-Mei 2009 negara itu mengadakan pemilihan umum (pemilu)
e. Harmonyzed System (HS): India melakukan perubahan penggunaan HS 2002 menjadi HS 2007 dalam jadwal penurunannya	e. Harmonyzed System (HS): ASEAN mengikuti	e. Menggunakan HS 2007	Perdana Menteri Manmohan Singh akan menunda semua penandatanganan FTA, termasuk antara India dan ASEAN hingga pemilu usai pertengahan Mei 2009 dan pemerintahan yang baru terbentuk
f. Tanggal penandatanganan: India menyatakan keberatannya untuk bertemu dengan pihak ASEAN jika pertemuan itu dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009	f. Tanggal penandatanganan: ASEAN menawarkan tanggal 15 Agustus 2009	f. Tanggal penandatanganan: 13 Agustus 2009	<b>ASEAN:</b> Ketidakstabilan politik Thailand sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan

### 3.1 Tahap Penyusunan dan Penandatanganan *Framework Agreement* (FA), periode 2002-2004

India merupakan pihak pertama yang berinisiasi dalam membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN. Keinginan India itu diungkapkan oleh Perdana Menteri India saat itu, Atal Bihari Vajpayee dalam ASEAN *Economic Ministers* (AEM)-India *Consultations* yang pertama September 2002, di Brunei Darussalam.<sup>162</sup> Sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri India itu, hasil dari kajian gabungan antara ASEAN-India, *Joint Study on AFTA-India Linkages for The Enhancement of Trade and Investment*, (ASEAN-India *Joint Study*) merekomendasikan hal yang sama yaitu agar kedua belah pihak membentuk India-AFTA *Regional Trade and Investment Area* (IARTIA).<sup>163</sup> Hasil kajian itu secara jelas menyatakan bahwa intgerasi ekonomi antara ASEAN dan India yang terbentuk dalam IARTIA mencakup beberapa hal seperti: pembukaan akses pasar dengan menghilangkan hambatan tarif maupun non-tarif, dan harmonisasi peraturan-peraturan terkait investasi dan perdagangan.<sup>164</sup>

ASEAN menyambut baik hal itu, dan sepakat membentuk ASEAN-India *Economic Linkages Task Force* (ASEAN-India *Task Force*) yang bertugas untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh ASEAN-India *Joint Study* dan membuat rancangan kerangka kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN-India (FA).<sup>165</sup> ASEAN-India *Task Force* kemudian menyerahkan kedua dokumen itu dalam pertemuan tingkat *Senior Economic Officials*<sup>166</sup> pada saat pertemuan AEM-India *Consultations* yang kedua bulan September 2003 di Kamboja.<sup>167</sup>

Hanya membutuhkan waktu satu tahun untuk merancanginya, Kerangka Kesepekatan yang dinamakan "*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of*

<sup>162</sup> Rahul Sen, *Free Trade Agreements in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), 80.

<sup>163</sup> ASEAN Sekretariat, "Joint Press Statement, The First ASEAN Economic Ministers and The Minister of India Consultation 15 September 2002 Brunei Darussalam," dalam <http://www.aseansec.org/12315.htm>. (diakses pada 21 Januari 2009, pukul 23.00 WIB).

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> Rahul Sen, *Op. Cit.*, hlm.82.

<sup>166</sup> "Joint Press Statement, The First ASEAN Economic Ministers and The Minister of India Consultation," *Op. Cit.*

<sup>167</sup> ASEAN Sekretariat, "Joint Press Statement, The Second ASEAN Economic Ministers and The Minister of India Consultation 3 September 2003, Kamboja," <http://www.aseansec.org/15081.htm>, (diakses pada 22 Januari 2009 pukul 22.00 WIB).

*Southeast Asian Nations*” (FA), akhirnya disepakati dan ditandatangani oleh ASEAN dan India pada ASEAN-India *Summit* ke dua di Bali, 8 Oktober 2003.<sup>168</sup> Beberapa poin yang tercantum di dalam FA yaitu: pertama, tentunya mengenai pembentukan ASEAN-India RTIA yang didalamnya terdapat penetapan Area Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi; kedua, pernyataan mengenai pembentukan ASEAN-India *Trade Negotiation Committee* (TNC) yang berfungsi sebagai pelaksana negosiasi ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam FA; ketiga, penetapan mengenai *Early Harvest Program* (EHP) yang di dalamnya terdapat penetapan *Rules of Origin* (ROO);<sup>169</sup> keempat, perlakuan khusus kepada negara-negara anggota baru ASEAN; kelima, jadwal efektif berlakunya perjanjian (*entry into force*) dan beberapa ketetapan lainnya.<sup>170</sup>

Dengan dapat diselesaikannya FA dalam waktu hanya satu tahun tampaknya proses perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India akan berjalan lancar. Namun kendala awal telah muncul, program EHP yang tercantum dalam FA gagal untuk dilaksanakan setelah beberapa kali mengalami pengunduran waktu. Berdasarkan FA, program EHP ini akan mempercepat penurunan tarif bagi 105 komoditas mulai 1 November 2004 dan ditargetkan selesai 31 Oktober 2007.<sup>171</sup> Kesepakatan mengenai EHP ini rencananya akan ditandatangani pada ASEAN-India Summit bulan November 2004 di Vietnam, namun akibat kesepakatan mengenai ROO EHP yang tidak dapat diselesaikan (antara ASEAN dan India)<sup>172</sup> maka jadwal pun direncanakan diundur menjadi 1 April 2005.<sup>173</sup> Dan kesepakatan antara ASEAN dan India mengenai pengaturan ROO EHP tidak

<sup>168</sup> ASEAN Sekretariat, “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations*,” dalam <http://www.aseansec.org/15278.htm>. (diakses pada 29 Agustus 2008, pukul 21.30 WIB).

<sup>169</sup> *Rules of Origin*: Kriteria untuk menentukan asal pembuatan sebuah produk (sumber: WTO, “Understanding the WTO: The Agreements,” [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm9\\_e.htm#origin](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#origin) (diakses pada 22 Oktober 2008 pukul 19.30 WIB).

<sup>170</sup> ASEAN Sekretariat, “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations*, Op.Cit..

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> “ASEAN-India FTA set to kick off in January,” *The Jakarta Post*, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2004/09/06/aseanindia-fta-set-kick-january.html?1>, diakses pada 20 Mei 2009 pukul 21.35 wib.

<sup>173</sup> Ministry of External Affairs India “ASEAN-India Relations,” dalam <http://meaindia.nic.in/onmouse/ASEAN%20-India.pdf>, (diakses pada 21 Mei 2009, pukul 16.45 WIB).

pernah tercapai karena akhirnya program EHP gagal untuk dilaksanakan,<sup>174</sup> pasal mengenai EHP dalam FA yaitu pasal 7 akhirnya dihapus dari FA dan beberapa pasal terkait lainnya pun mengalami perubahan.<sup>175</sup> Tanda-tanda lambannya proses perundingan akan berjalan, akibat alotnya proses negosiasi, telah ditenggarai oleh kedua belah pihak sejak awal. Bahkan pada pertemuan ketiga AEM-India consultations di Jakarta, September 2004, para menteri masing-masing pihak mendorong ASEAN-India TNC untuk menyelesaikan penyusunan perjanjian perdagangan bebas diselesaikan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam FA,<sup>176</sup> yaitu Juni 2005.

Munculnya keinginan untuk membentuk perdagangan bebas dan tersusunnya FA dalam waktu yang singkat, jika dilihat dari sisi domestik India, yaitu pada periode 2002-2004 India sedang berada dalam kondisi ekonomi dan politik yang cukup stabil dan bagus.<sup>177</sup> Sejak tahun 1999-2004 (periode saat India menyatakan keinginannya membentuk FTA dengan ASEAN) India berada di bawah kepemimpinan pemerintahan *National Democratic Alliances* (NDA).<sup>178</sup> NDA adalah koalisi partai yang dipimpin oleh *Bharatiya Janata Party* (BJP). BJP merupakan partai beraliran kanan Hindu nasionalis, yang menurut Shulman<sup>179</sup> memiliki tujuan mereformasi negara India agar sejalan dengan agama dan kebudayaan Hindu. BJP memiliki cita-cita untuk memberikan India (bangsa Hindu) tempat dan peran yang pantas (lebih besar) di dunia sesuai dengan kemampuannya yang sebenarnya. Keinginan BJP itu tercermin dari kebijakan ekonomi yang diusungnya yaitu globalis, perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi bagi investasi asing, diharapkan dengan terus membuka diri terhadap ekonomi dunia, negara India dan khususnya bangsa Hindu tidak lagi dilihat

<sup>174</sup> Nina Laraswati, Customs Officer, ASEAN Secretariat, diwawancara oleh penulis. 23 April 2009 pukul 14.00-15.00 di gedung ASEAN Secretariat, Jakarta, alat tulis.

<sup>175</sup> ASEAN Sekretariat, "Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India," <http://www.aseansec.org/22678.pdf> (diakses pada 29 Agustus 2008, pukul 22.30 WIB).

<sup>176</sup> ASEAN Sekretariat, "Joint Media Statement: The Third ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce and Industry of the Republic of India Consultation," <http://www.aseansec.org/16379.htm>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 23.05 WIB).

<sup>177</sup> Ahmad Qisai, pengamat politik mendapatkan Ph.D dalam politik dari Aligarh Muslim University, Aligarh, India. Pengajar di Graduate School of Diplomacy Paramadina dan S1 HI UI, tentang Asia Tengah, diwawancara oleh penulis pada 4 Mei 2009 pukul 16.00-17.00 WIB.

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> Stephen Shulman, "Nationalist Sources of International Economic Integration," *International Studies Quarterly*, Vol. 44, No. 3 (2000), 380.

sebagai bangsa yang lemah dan mampu maju serta memiliki peran yang kuat di dunia internasional.<sup>180</sup>

Arah kebijakan ekonomi BJP untuk mereformasi (liberalisasi) ekonomi India semakin terlihat jelas ketika Atal Bihari Vajpayee, yang diusung oleh BJP, memimpin India (1999-2004). Vajpayee terus berusaha meyakinkan pendukungnya dengan memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi asing dan swasta.<sup>181</sup> Liberalisasi ekonomi dilakukan di berbagai sektor industri terhadap investasi asing, bahkan terhadap sektor-sektor yang sebelumnya dinyatakan akan dilindungi seperti sektor perdagangan, jasa dan pertanian.<sup>182</sup>

Seperti yang ditunjukkan dalam Bab 2, sampai dengan periode 2004, India mengalami pertumbuhan sektor perdagangan luar negeri hingga mencapai nilai 195 milyar dolar AS atau meningkat sebesar 37% dibandingkan periode sebelumnya dan peningkatan terus terjadi dari tahun ke tahun. Beberapa indikator pertumbuhan ekonomi pun menunjukkan peningkatan yang berarti, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) India, mencatat nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar 669,44 milyar dolar AS, pertumbuhan PDB rata-rata India pada periode pemerintahan PM Atal Bihari Vajpayee, 1999-2004 adalah sebesar kurang lebih 5 – 5,9% per tahun. Selain PDB, India pun dengan upaya reformasi iklim investasinya, sedikit banyak mencatat peningkatan pemasukan dari sektor investasi asing langsung, yang pada tahun 2004 tercatat investasi asing langsung yang masuk ke India adalah sebesar 5,77 milyar dolar AS.

Dengan semua pertumbuhan ekonomi dan perdagangan luar yang dialaminya ini keinginan untuk membentuk FTA dengan negara lain menjadi sangat masuk akal, dengan membentuk FTA dengan suatu negara, India berusaha membuka pasar baru bagi produk-produknya baik produk barang maupun jasa. Salah satu alasan bagi suatu negara dalam membentuk FTA dengan negara lain

---

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> Ahmad Qisai, *Op. Cit.*

<sup>182</sup> Stephen Shulman, *Op. Cit.*

adalah membuka pasar baru di negara lain bagi produk-produk yang dihasilkannya.<sup>183</sup>

Namun liberalisasi ekonomi dengan masuknya investasi asing yang sedemikian besar dan perdagangan bebas yang diterapkan oleh BJP telah mendatangkan kritik dari berbagai pihak baik internal partai maupun pihak oposisi. Partai Komunis, salah satu oposisi BJP, bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa BJP lebih memikirkan kepentingan WTO, IMF, dan AS.<sup>184</sup> Dan pada pertengahan Mei 2004, BJP dan Vajpayee harus turun dari tampuk kepemimpinan India setelah menelan kekalahan dari koalisi *United Progressive Alliances* (UPA) dalam pemilihan umum saat itu.

Pada periode yang sama ini pula, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 2, ASEAN semakin menunjukkan keinginannya untuk memperkuat integrasi di dalam tubuhnya sendiri dan juga memperkuat hubungan dengan para mitranya (*outward looking*). Periode ini ditandai dengan ASEAN Vision 2020 yang mencita-citakan terbentuknya komunitas ASEAN pada tahun 2020, kemudian dilatarbelakangi oleh visi itu maka disusunlah HPA yang memiliki kerangka waktu dari tahun 1999-2004, dan dilanjutkan dengan disusunnya *Initiative for ASEAN Integration WorkPlan* yang pertama yaitu untuk jangka waktu 2002-2008, yang berisi serangkaian proyek untuk mempererat integrasi ASEAN.<sup>185</sup> Akhirnya pada tahun 2004 tersusunlah VAP, jangka waktu 2004-2010.

Semua rangkaian kerja dan *roadmap* itu merupakan wujud keseriusan dari negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020. Baik HPA, IAI workplan, dan juga VAP merancang integrasi ekonomi ASEAN yang inklusif. Sikap *outward-looking* ASEAN dibuktikan dengan terbentuknya forum ASEAN+3 beserta *bilateral swap arrangement* yang dihasilkannya pada tahun 2000 melalui *Chiang Mai Initiative*. Terbentuknya EAVG untuk menyusun konsep EAC juga merupakan bukti ASEAN telah menjadi suatu organisasi yang terbuka secara ekonomi.

---

<sup>183</sup> Martua Sihombing Direktur Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Departemen Perdagangan Republik Indonesia, diwawancara oleh penulis, 20 November 2009. Gedung Departemen Perdagangan Republik Indonesia pukul 14.00 – 15.00, alat tulis.

<sup>184</sup> Stephen Shulman, *Op. Cit.*, hlm.380.

<sup>185</sup> ASEAN Sekretariat, "Status Updates of the IAI Workplan (2002-2008)," <http://www.aseansec.org/21636.pdf>, (diakses pada 23 Desember 2008, pukul 18.15 WIB).

Kejadian yang memicu ASEAN untuk memperkuat integrasi ekonomi baik internal maupun eksternal (keluar) dengan mitra-mitranya adalah krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. ASEAN semenjak krisis menyadari perlunya arah dan desain integrasi yang lebih jelas dan terarah di dalam tubuhnya sehingga integrasi tidak bersifat reaktif. ASEAN menyadari pula, semenjak krisis, bahwa AS tidak lagi dapat diandalkan sehingga ASEAN berpaling ke sesama negara Asia salah satunya yaitu India. Selain itu ASEAN menyadari bahwa India saat ini dari waktu-waktu semakin menunjukkan perannya dalam kancah politik dan ekonomi dunia, India tidak lagi dapat diabaikan oleh ASEAN dalam rangka memperkuat suara negara-negara berkembang dalam forum-forum internasional.<sup>186</sup> Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Gilpin bahwa persaingan ekonomi yang semakin ketat akan memacu negara atau kawasan untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dari sisi penerapan strategi terlihat jelas bahwa India menerapkan strategi *integrative* dalam pembentukan FTA dengan ASEAN, karena India adalah pihak yang pertama kali mengajukan penawaran membentuk FTA. Seperti yang dijelaskan oleh Odell bahwa salah satu ciri yang menunjukkan bahwa strategi *integrative* digunakan adalah bahwa pihak itu berinisiasi atau menawarkan pembentukan suatu perjanjian yang saling menguntungkan. ASEAN walaupun bukan pihak yang melakukan inisiasi menerima secara terbuka tawaran pembentukan FTA dari India, sehingga ASEAN dapat dikatakan pula menerapkan strategi yang sama dengan India yaitu strategi *integrative*.

Sedangkan dari sisi faktor domestik terlihat bahwa kondisi dari masing-masing pihak ASEAN dan India telah memberikan pengaruh terhadap tahap pencapaian kesepakatan. Seperti yang dijelaskan oleh Lenter<sup>187</sup> bahwa salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara yang berasal dari sisi domestik atau internal adalah rezim yang berkuasa di negara itu. Faktor pemimpin menjadi penting menurut Lenter, karena pemimpin yang berbeda akan

---

<sup>186</sup> ASEAN Sekretariat, "Deepening ASEAN-India Partnership: Chairman's Statement of the 3rd ASEAN + India Summit Vientiane, 30 November 2004," <http://www.aseansec.org/16745.htm>, (diakses pada 23 Desember 2008 pukul 21.00 WIB).

<sup>187</sup> Howard H. Lenter, *Op. Cit.*, hlm.160-161.

membawa ideologi yang berbeda, keinginan dan tujuan yang berbeda, serta pengikut-pengikut (konstituen) yang berbeda pula. Kesemua itu tentunya akan memengaruhi kebijakan luar negeri yang diambilnya. Hal ini terbukti jika melihat apa yang terjadi di India, Vajpayee seorang yang berideologi kanan beserta partainya berinisiasi membuka perdagangan bebas dengan ASEAN dan menunjukkan kesungguhan dalam menyusun FA sebagai kerangka kerja integrasi ekonomi komprehensif sehingga penyusunannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu pula dengan ASEAN, organisasi itu semenjak krisis tahun 1997/1998 memperkuat integrasi di tubuhnya dan semakin membuka dirinya terhadap mitra dagangnya terutama ke sesama negara Asia. Kondisi yang mendukung dari masing-masing pihak telah menyebabkan tahap penyusunan FA berjalan dengan lancar. Kendala baru mulai muncul tahun 2004, masa ketika BJP dan Vajpayee turun dari tampuk kepemimpinan pemerintah India. Kondisi hubungan ekonomi di antara keduanya pun saat itu menunjukkan arah yang sangat positif, sehingga kedua belah pihak menyadari pentingnya kerjasama ekonomi yang lebih erat (yaitu dengan membentuk FTA).<sup>188</sup>

### **3.2 Tahap Kesepakatan secara Prinsip Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang, periode 2004-2008**

Setelah program EHP mengalami kegagalan, ASEAN dan India langsung melanjutkan negosiasi melalui ASEAN-India TNC.<sup>189</sup> Mengambil pelajaran dari kegagalan program EHP dan kesadaran akan sulitnya proses perundingan, kedua belah pihak dalam setiap perundingan tingkat menteri ataupun *summit* mendorong masing-masing perwakilan tim negosiasi untuk dapat menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi demi menyelesaikan isu-isu atau hal yang memisahkan kedua belah pihak.<sup>190</sup>

Namun demikian, negosiasi perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang yang seharusnya selesai pada Juni 2005, sebagaimana

<sup>188</sup> ASEAN Sekretariat, "Joint Press Statement, The Second ASEAN Economic Ministers and The Minister of India Consultation, *Op. Cit.*

<sup>189</sup> Nina Laraswati, *Op. Cit.*

<sup>190</sup> ASEAN Sekretariat, "Joint Media Statement of the Fifth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce and Industry of India 24 August 2006 Kuala Lumpur," <http://www.aseansec.org/18717.htm> (diakses pada 20 Desember 2008 pukul 21.30 WIB).

ditetapkan dalam FA,<sup>191</sup> akhirnya baru dapat diselesaikan pada 28 Agustus 2008 dalam AEM-India *Consultations* keenam di Singapura.<sup>192</sup> Sehingga secara prinsip Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang telah disepakati pada pertemuan konsultasi itu. Kesepakatan ASEAN-India dalam perjanjian perdagangan bebas bidang perdagangan barang ini, mundur lebih dari tiga tahun dari jadwal yang ditetapkan, ditunda sebanyak dua kali (lihat Lampiran untuk lebih lengkap),<sup>193</sup> membutuhkan lebih dari dua puluh (21) kali pertemuan TNC,<sup>194</sup> dan membutuhkan empat (4) kali putaran pertemuan AEM-India *Consultations*.<sup>195</sup>

Perundingan mengenai ROO<sup>196</sup> dan Daftar Komoditas Sensitif/Negatif adalah hal yang menyebabkan proses pencapaian kata sepakat berlangsung lamban dan cukup lama dari tahun 2004-2008.<sup>197</sup> Lambannya proses perundingan perdagangan barang ASEAN-India FTA akibat isu ROO sempat disinggung dan menjadi perhatian para menteri dalam AEM-India keempat,<sup>198</sup> “*The Ministers noted the developments in the negotiations to establish the AIFTA and expressed concern over the slow progress in the process.*” Lebih lanjut para menteri menekankan pentingnya bagi pihak yang terlibat untuk lebih fleksibel terutama menyangkut isu ROO.<sup>199</sup>

Permasalahan muncul ketika ASEAN menolak dua kriteria ROO India, yaitu *value added (regional value content)* sebesar 40% dan *Change in Tariff Heading (CTH)*<sup>200</sup>.<sup>201</sup> ASEAN hanya menginginkan penerapan *value added* tanpa

<sup>191</sup> ASEAN Sekretariat, “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations,*” *Op. Cit.*

<sup>192</sup> ASEAN Sekretariat, “Joint Media Statement of the Sixth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce and Industry of India, 28 Agustus 2008 Singapore” <http://www.aseansec.org/21895.htm>, (diakses pada 10 Desember 2008 pukul 17.50 WIB).

<sup>193</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, “ASEAN-India Free Trade Area,” (Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen KPI).

<sup>194</sup> Department of Commerce Government of India, “India's Current Engagements in RTAs,” dalam [http://commerce.nic.in/trade/international\\_ta\\_current\\_details.asp](http://commerce.nic.in/trade/international_ta_current_details.asp), (diakses pada 18 April 2009, pukul 21.35 WIB).

<sup>195</sup> Vibhanshu Shekhar, “*India's First Multilateral FTA: Lesson Learnt,*” *Op. Cit.*

<sup>196</sup> ASEAN Sekretariat, “Joint Media Statement of the Fourth AEM-India Consultations 30 September 2005, Vientiane Laos,” dalam <http://www.aseansec.org/17799.htm>, (diakses pada 20 Desember 2008 pukul 22.00 WIB).

<sup>197</sup> Nina Laraswati, *Op. Cit.*

<sup>198</sup> ASEAN Sekretariat, “Joint Media Statement of the Fourth AEM-India Consultations 30 September 2005, Vientiane,” *Op. Cit.*

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> Tariff Heading: deskripsi dari sebuah *tariff line*, nama sebuah produk tertentu contoh kapas, sapi dan sebagainya. (sumber: Alan V. Deardoff, “Terms of Trade: Glossary of International

diberlakukannya CTH dengan alasan jika CTH, ataupun *Change in Tariff Sub-Heading* CTSH<sup>202</sup> seperti yang telah disepakati oleh ASEAN dan India, diberlakukan maka pemberlakuan tarif nya pun akan berbeda,<sup>203</sup> sehingga peraturan ROO yang sangat kaku seperti ini akan menggagalkan penetapan tarif yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>204</sup>

Dan ketika kesepakatan dalam ROO tercapai, kedua belah pihak lalu membahas mengenai Daftar Komoditas Sensitif/Negatif.<sup>205</sup> Pada awal negosiasi India mengajukan sebanyak 1.414 komoditas barang untuk dimasukkan dalam Daftar Komoditas Pengecualian sehingga 1.414 komoditas itu tidak akan terkena penghapusan tarif. Namun ASEAN di satu sisi menginginkan hanya sekitar 400 komoditas saja.<sup>206</sup> Ganjalan utama lainnya yang menyebabkan penundaan-penundaan kesepakatan, tampaknya terjadi pada negosiasi terkait dengan lima komoditas yang masuk dalam *Higly Sensitive Track* (HST) atau *special products* yaitu: minyak sawit mentah, minyak sawit suling, teh hitam, kopi, dan lada.<sup>207</sup> Terutama dalam hal minyak sawit, kendala awal adalah India memberikan tarif yang terlalu tinggi bagi kedua komoditas itu, yang merupakan komoditas unggulan ekspor dari Indonesia dan Malaysia.<sup>208</sup> Isu mengenai sulitnya mencapai kata sepakat untuk menetapkan *modalities* dalam perdagangan barang tercantum pula dalam pernyataan bersama para Menteri ASEAN dan India. Para Menteri dari kedua belah pihak menyatakan kepada para perundingnya agar segera

---

Economics,” (Laman University of Michigan) <http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/>, (diakses pada 19 Juni 2009 pukul 21.35 WIB)).

<sup>201</sup> Bernama, “Asean-India FTA Implementation To Be Amended To Jan 1, 2007,” [http://www.bernama.com/bernama/v3/news\\_lite.php?id=157402](http://www.bernama.com/bernama/v3/news_lite.php?id=157402), (diakses pada 23/03/2009 pukul 11.55 WIB).

<sup>202</sup> Tariff Sub-Heading: deskripsi atau nama sebuah produk turunan dari sebuah produk utama (Sumber: Asianto Sinambela, diwawancara oleh penulis, 22 November 2009, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, alat perekam).

<sup>203</sup> Asianto Sinambela, diwawancara oleh penulis, 22 November 2009, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, alat perekam.

<sup>204</sup> India One Stop.com, an affiliate of the Wall Street Journal, “Transparent, Open & Outward-Looking Regional Processes: Must for Asia’s sustainable emergence in 21st Century,” (hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, 2003-2008, H.E. Ong Keng Yong), <http://www.indiaonestop.com/face2face/aseansg.htm>, (diakses pada 25 April 2009, pukul 20.55 WIB).

<sup>205</sup> “India’s Current Engagement to RTAs,” *Op. Cit.*

<sup>206</sup> Vibanshu Shekhar, “Spoilers in the ASEAN-India Free Trade Agreement,” dalam <http://www.ipcs.org/whatsNewArticle11.jsp?action=showView&kValue=2296&status=article&mod=b>, (diakses pada 25 September 2008, pukul 22.30 WIB).

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> Vibhanshu Shekhar, “India’s First Multilateral FTA: Lesson Learnt,” *Op. Cit.*

menyelesaikan isu modalities perdagangan barang dalam perundingan.<sup>209</sup> Setelah melalui proses panjang selama 4 tahun, akhirnya *Generals Rules of Origin*, Daftar Komoditas Sensitif dan juga *Dispute Settlement Mechanism* berhasil disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>210</sup>

Proses negosiasi sempat mencapai titik buntu atau tidak ada kemajuan berarti yaitu pada tahun 2007, hingga akhirnya pihak ASEAN khususnya dari Malaysia mengancam akan menunda proses negosiasi,<sup>211</sup> dan negosiasi pun memang sempat tertunda hingga sebanyak dua kali,<sup>212</sup> sejak itu India bersikap lebih kooperatif.<sup>213</sup> Dan setelah semua *modalities* perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak pada bulan Agustus 2009, maka pada bulan November 2008 dalam *Senior Economic Officials Ministers (SEOM)-India Consultations* di Pattaya, draft perjanjian di bidang perdagangan barang berhasil pula diselesaikan untuk diproses secara internal oleh masing-masing pihak. Hal yang belum difinalisasi saat itu (November 2008) adalah kerangka waktu penurunan tarif yang baru (lihat Lampiran untuk lebih lengkap).<sup>214</sup> Draft perjanjian itu direncanakan akan ditandatangani pada ASEAN-India Summit bulan Desember 2008 di Pattaya Thailand.<sup>215</sup>

*Modalities* yang tercantum dalam kesepakatan perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang ASEAN-India (Agustus 2008) itu antara lain adalah mengenai pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan antara kedua belah pihak hingga 80% dari jumlah *tariff lines*<sup>216</sup> antara ASEAN dan India pada tahun 2015. Pengurangan tarif diharapkan dapat dimulai pada tahun 2009 bertahap hingga tahun 2015. 71% dari jumlah *tariff lines* perdagangan antara

<sup>209</sup> ASEAN Sekretariat, "Joint Media Statement of the Fifth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce and Industry of India, *Op. Cit.*

<sup>210</sup> "India's Current Engagement to RTAs," *Op. Cit.*

<sup>211</sup> Nina Laraswati, *Op. Cit.*

<sup>212</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "ASEAN-India Free Trade Area," *Op. Cit.*

<sup>213</sup> Nina Laraswati, *Op. Cit.*

<sup>214</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "ASEAN Secretariat Information Paper, *Progress Report of the ASEAN-India FTA Negotiations* dalam 14<sup>th</sup> SEOM-India Consultations di Bangkok, Thailand," 6 February 2009.

<sup>215</sup> ASEAN Sekretariat, "Joint Media Statement of the Sixth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce and Industry of India, *Op. Cit.*

<sup>216</sup> Tarif adalah bea pabean yang dikenakan terhadap barang-barang impor; *Tariff Line(s)*: sebuah produk(barang) yang didefinisikan oleh kode untuk penetapan tarif bagi produk itu. Biasanya terdapat dalam Jadwal tariff sebuah Negara. (Sumber: WTO, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/tariffs\\_e/tariff\\_data\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm)).

ASEAN dan India akan dikurangi tarifnya hingga 0% pada tahun 2012 dan sisanya 9% *tariff lines* perdagangan akan dihilangkan tarifnya pada tahun 2015,<sup>217</sup> ketentuan ini berlaku bagi komoditas-komoditas yang masuk dalam Daftar Komoditas Jalur Normal. Secara lengkap isi kesepakatan perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang ASEAN-India dalam perdagangan barang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Jalur Normal 2008**

Jalur Normal	ASEAN 5 & India	Filipina & India	CLMV & India
71% <i>tariff lines</i> & 72% nilai impor (NT1)	31.12.2012	31.12.2017	31.12.2017
9% <i>tariff lines</i> & 3% nilai impor (NT2)	31.12.2015	31.12.2018	31.12.2020

Sumber: Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN-India FTA," [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), (diakses pada 22 Januari 2009, pukul 22.35 WIB).

Barang-barang yang terdaftar dalam Jalur Normal akan dihapus tarifnya, sedangkan barang-barang yang termasuk dalam Jalur Sensitif akan diturunkan atau dihapus sesuai dengan kesepakatan dan tenggat waktu yang ditetapkan.<sup>218</sup> Tabel 3.3 di bawah ini merupakan peraturan penurunan tarif dalam Jalur Komoditas Sensitif.

<sup>217</sup> Economic Times India Times, "ASEAN-India FTA Negotiations Conclude," dalam [http://economictimes.indiatimes.com/Features/The\\_Sunday\\_ET/As\\_You\\_Like\\_It/Asean-India\\_FTA\\_negotiations\\_conclude/articleshow/3426974.cms](http://economictimes.indiatimes.com/Features/The_Sunday_ET/As_You_Like_It/Asean-India_FTA_negotiations_conclude/articleshow/3426974.cms), (diakses pada 20 Januari 2009 pukul 22.05 WIB).

<sup>218</sup> Komisi Tarif Filipina, "ASEAN-India FTA," <http://www.tariffcommission.gov.ph/AIFTA%20ppt%209-25-08PH.ppt>, (diakses pada 20 November 2008 pukul 20.50 WIB).

Tabel 3.3 Jalur Sensitif 2008

Jalur Sensitif	ASEAN 5 & India	Filipina & India	CLMV & India
Pengurangan tarif hingga 5%:	31.12.2015	31.12.2018	31.12.2020
Penghapusan tarif dari 4% <i>tariff lines</i> yang ada di Jalur sensitif:	31.12.2018	31.12.2021	31.12.2023

Sumber: Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN – India FTA," dalam [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), (diakses pada 22 Januari 2009, pukul 22.35 WIB).

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, komoditas yang memiliki tarif di atas 5% (lima persen) akan diturunkan tarifnya hingga mencapai 5%, sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam tabel di atas. Sedangkan komoditas yang sudah memiliki tarif 5% tidak akan dikurangi lagi (*tariff lines* masuk ke dalam *Standstill lines*), jumlahnya ditetapkan maksimal 50 *tariff lines*. Untuk *tariff lines* yang masih tersisa dalam jalur sensitif akan dikurangi hingga 4.5% dan kemudian akan dikurangi kembali hingga 4% pada tahun 2015 untuk ASEAN 5 dan 2018 untuk Filipina.<sup>219</sup> Sedangkan 4% dari *tariff lines* yang masih terdapat di Jalur Sensitif akan dihapuskan hingga 0% pada 2018 untuk ASEAN 5 dan India, dan pada tahun 2021 dan 2023 untuk masing-masing negara Filipina dan negara-negara CLMV.

India memasukkan minyak sawit mentah dan minyak sawit suling, kopi, teh hitam, serta lada ke dalam Jalur Daftar Komoditas Sangat Sensitif (HST) atau *special products*. Tarif impor kopi dan teh hitam akan dikurangi hingga 45%, dan untuk lada akan dikurangi hingga 50% pada tanggal 31 Desember 2018 bagi ASEAN 5 (Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Brunei Darussalam). Sedangkan untuk minyak sawit mentah, tarif impor akan diturunkan hingga 37,5% dan minyak sawit murni hingga 45% pada tanggal 31 Desember 2018 bagi ASEAN 5.<sup>220</sup> Dan untuk Daftar Komoditas Pengecualian berdasarkan kesepakatan

<sup>219</sup> Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN – India FTA," [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), (diakses pada 22 Januari 2009, pukul 22.35 WIB).

<sup>220</sup> *Ibid.*

antara ASEAN dan India, terdapat 489 barang atau produk India yang akan masuk ke dalam jalur ini dan tidak akan mengalami pemotongan tarif masuk.<sup>221</sup> Produk atau komoditas yang masuk dalam Daftar Komoditas Pengecualian mencakup sebagian besar sektor pertanian, tekstil, kimia, permesinan dan otomotif.<sup>222</sup> Sedangkan dalam ROO, keduanya sepakat untuk menetapkan nilai isi regional (*regional value content*) sebesar 35% ditambah dengan CTSH.<sup>223</sup>

Lambannya proses negosiasi jika dilihat dari sisi domestik India, tidak dapat disangkal pihak India mendapatkan tekanan dan lobi dari dalam negeri, seperti dari pengusaha dan petani India.<sup>224</sup> Menurut Suryamurthy, sektor-sektor industri domestik India yang akan terkena dampak negatif dari perdagangan bebas dengan ASEAN antara lain, industri alat-alat elektrik seperti lampu, suku cadang otomotif, dan tekstil. Sedangkan dari sektor pertanian, komoditas-komoditas seperti kelapa sawit, teh, kopi dan lada dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan komoditas serupa yang berasal dari Malaysia, Vietnam, dan Indonesia yang memiliki harga lebih murah daripada India.<sup>225</sup>

Senada dengan yang dipaparkan oleh Suryamurthy, menurut Baru<sup>226</sup> ada tiga pihak utama yang menentang terbentuknya FTA ini, *pertama* adalah pelaku industri *oilseeds* dalam negeri India, mereka menentang diturunkannya tarif masuk bagi minyak kelapa sawit. *Kedua*, menurutnya yaitu pelaku industri manufaktur India, mereka khawatir terhadap ketetapan ROO dalam FTA yang menurut mereka terdapat celah di dalam ketetapan ROO itu yang memungkinkan masuknya produk-produk murah asal Cina melalui ASEAN. *Ketiga*, yaitu pelaku industri pertanian di suatu daerah bernama Kerala, mereka khawatir terhadap masuknya produk-produk pertanian yang lebih murah seperti karet, kopi, teh, lada dan minyak kelapa sawit dari ASEAN. Para pelaku industri di daerah Kerala ini bahkan pada tahun 2007 pernah mengirimkan delegasi mereka untuk bertemu

<sup>221</sup> Vibhanshu Shekhar, "India's First Multilateral FTA: Lesson Learnt," *Op. Cit.*

<sup>222</sup> India Brand Equity Foundation, "India and ASEAN,"

<http://www.ibef.org/india/indiaasean.aspx>, (diakses pada 31/03/2009, pukul 12.15 WIB).

<sup>223</sup> Ministry of International Trade and Industry Malaysia, *Op. Cit.*

<sup>224</sup> Vibhanshu Shekhar, "India's First Multilateral FTA: Lesson Learnt," *Op. Cit.*

<sup>225</sup> R. Suryamurthi, "ASEAN Deal Hits Dual Hurdle," (The Telegraph India), [http://www.telegraphindia.com/1090223/jsp/business/story\\_10577129.jsp#](http://www.telegraphindia.com/1090223/jsp/business/story_10577129.jsp#), (diakses pada 23 Maret 2009, pukul 11.15 WIB).

<sup>226</sup> Sanjaya Baru, "Look East Policy Comes of Age," (Business Standard India), <http://www.business-standard.com/india/news/sanjaya-baru-look-east-policy-comesage/373827/>, (diakses pada 21 Oktober 2009 pukul 14.00 WIB).

dengan Manmohan Singh, dengan tujuan untuk memaksa Singh menghentikan atau membatalkan proses perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN.<sup>227</sup> Kerasnya tekanan dan lobi pihak Kerala dikarenakan pengaruh yang sangat kuat dari Partai Komunis India, *The Communist Party of India-Marxist (CPM)*.<sup>228</sup>

Selain itu, pada tahun 2004 terjadi perubahan kepemimpinan di India, Partai yang dipimpin oleh Atal Bihari Vajpayee, Bharatiya Janata Party yang tergabung dalam NDA, yang menganut paham ekonomi liberal, kalah dalam pemilihan umum, dan posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Manmohan Singh dari Partai Kongres yang tergabung dalam koalisi UPA.<sup>229</sup> Partai Kongres bagaimanapun juga adalah Partai yang pada awalnya lebih condong kepada ideologi sosialis dalam kebijakan ekonominya dengan menekankan pada proteksionisme, seperti yang terlihat dalam kepemimpinan Jawaharlal Nehru di awal kemerdekaan India.<sup>230</sup> Kebijakan itu mulai berubah ketika Manmohan Singh masuk ke dalam Partai. Dimulai ketika masih menjabat Menteri Keuangan India, di bawah kepemimpinan Narashima Rao, Partai Kongres mulai merubah arah kebijakan ekonominya menjadi lebih terbuka dan akhirnya mereformasi ekonomi India pada awal 1990-an.<sup>231</sup>

Kebijakan yang diambil dalam suatu koalisi tentunya dipengaruhi oleh tekanan kepentingan partai-partai yang bergabung di dalamnya, dan koalisi UPA saat itu mendapatkan dukungan dari CPM yang menentang proses liberalisasi ekonomi, sehingga proses perjanjian perdagangan bebas pun menjadi terhambat.<sup>232</sup> Ditambah dengan seruan dari Pimpinan Partai Kongres Sonia

---

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> P. Vijian, "Kerala Ready For Massive Rally To Oppose Asean-India FTA," (Bernama), <http://www.bernama.com/bernama/v5/newsindex.php?id=443717>, (diakses pada 12 November 2009 pukul 22.30 WIB).

<sup>229</sup> Ahmad Qisai, *Op. Cit.*

<sup>229</sup> Francis A.Menez, *Op. Cit.*

<sup>230</sup> The New York Times, "Manmohan Singh," [http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/manmohan\\_singh/index.html](http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/manmohan_singh/index.html), (diakses pada 19 Juni 2009 pukul 18.30 WIB).

<sup>231</sup> Ahmad Qisai, *Op. Cit.*

<sup>232</sup> *Ibid.*

Gandhi kepada Manmohan Singh agar dalam perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, kepentingan para petani India tidak dirugikan.<sup>233</sup>

Seruan itu disampaikan oleh Sonia Gandhi melalui sebuah surat pada April 2005 tepat dua bulan sebelum perjanjian itu dijadwalkan selesai (Juni 2005). Isi surat itu menyatakan bahwa:<sup>234</sup>

*“The Congress party feels that instead of opening up the agricultural and manufacturing sectors through FTAs, more effective domestic policy measures need to be adopted to protect and strengthen the growers and manufacturers in these sectors.”*

Partai Kongres lebih mendukung kebijakan yang melindungi dan memperkuat para petani dan pelaku industri manufaktur daripada harus membuka pasar di sektor pertanian dan manufaktur dalam FTA (dengan ASEAN). Tentangan yang datang, tidak hanya dari partai koalisi tetapi juga internal partai Singh, diindikasikan semakin memperberat langkah pemerintahan Singh untuk segera menyelesaikan FTA dengan ASEAN.

Namun akhirnya Partai Komunis keluar dari koalisi UPA pada pertengahan tahun 2008, pada waktu yang kurang lebih sama dengan disepakatinya perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang (secara prinsip) Agustus 2008.<sup>235</sup> Diyakini bahwa perpecahan koalisi antara UPA dan CPM telah memperlancar proses liberalisasi ekonomi India termasuk dalam proses perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, karena sejak awal CPM tidak setuju dengan dibentuknya FTA ini.

Sedangkan dari sisi ASEAN, tertundanya kesepakatan menurut beberapa pihak disebabkan oleh sikap ASEAN yang terlalu kaku.<sup>236</sup> Sikap Malaysia, sebagai negara koordinator negosiasi dari ASEAN, seringkali bertindak terlalu keras dengan mengambil keputusan untuk menunda beberapa kali negosiasi akibat ketidaksepakatan dalam beberapa hal.<sup>237</sup> Sikap keras ASEAN itu ditunjukkan oleh sikap Sekretaris Jenderal ASEAN saat itu yaitu Ong Keng Yong dalam

<sup>233</sup> The Times of India, “India-Asean FTA Hits Fresh Roadblock,” <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1661385.cms>, (diakses pada 23 Maret 2009 pukul 20.00 WIB).

<sup>234</sup> Sanjaya Baru, *Op. Cit.*

<sup>235</sup> Ahmad Qisai, *Op. Cit.*

<sup>236</sup> Vibhanshu Shekhar, “India-ASEAN FTA Negotiations: The Way Forward,” *Op. Cit.*

<sup>237</sup> Vibhanshu Shekhar, “Spoilers in the ASEAN-India Free Trade Agreement,” *Op. Cit.*

menanggapi penawaran Daftar Komoditas Sensitif India yang berjumlah 1414 komoditas, menurutnya suatu perjanjian perdagangan bebas itu haruslah menghapus tarif komoditas-komoditas perdagangan hingga 0% kecuali bagi sedikit komoditas-komoditas sensitif. Begitupun mengenai permasalahan ROO, dia beranggapan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ROO janganlah terlalu kaku sehingga akan menggagalkan penetapan tarif yang telah disepakati.

FTA yang sebenarnya menurut Ong Keng Yong adalah FTA yang mampu memfasilitasi proses perdagangan dan investasi bagi pihak-pihak yang bersepakat, dan jika ROO terlalu kaku, lalu untuk apa kita membentuk FTA. Ong Keng Yong ingin menunjukkan bahwa ASEAN saat ini sedang melakukan strategi ekonomi dua arah, yaitu integrasi ekonomi internal dan integrasi ekonomi eksternal dimana ASEAN ingin menunjukkan bahwa ia memiliki sikap *outward looking* atau terbuka bagi para mitranya.<sup>238</sup> Sikap (yang dikatakan) kaku sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa ASEAN siap bersikap terbuka dan ASEAN menginginkan hal yang sebaliknya dari mitranya dalam hal ini India.

Seperti yang dijelaskan oleh Ong Keng Yong bahwa ASEAN sedang menjalankan strategi ekonomi dua arah, internal dan eksternal, terbukti bahwa pada periode itu ASEAN secara internal memperkuat integrasi ekonomi didalam tubuhnya dengan dikeluarkannya ASEAN Charter pada tahun 2005 dan juga penetapan 11 sektor prioritas dalam integrasi ekonomi ASEAN. Sedangkan secara eksternal, ASEAN secara intensif mengadakan pembicaraan pembentukan FTA dengan beragam negara, di luar India, mulai dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia dan juga Selandia Baru.<sup>239</sup> Pembicaraan itu diluar fakta bahwa ASEAN “menyatukan” negara-negara tersebut dalam satu forum yaitu East Asia Summit (EAS).

Faktor internal lain yang diasumsikan mendorong ASEAN untuk menyelesaikan kesepakatan perjanjian perdagangan bebas dengan India adalah Singapura. Singapura adalah negara yang terus mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi dengan India dan juga Perdana Menteri Singapura saat itu yang mengeluarkan pernyataan optimistis

---

<sup>238</sup> India One Stop.com, an affiliate of the Wall Street Journal, *Op. Cit.*

<sup>239</sup> *Ibid.*

bahwa India diibaratkan sebagai salah satu pendukung bagi ASEAN untuk “lepas landas” dan bertahan menghadapi tantangan di depan.<sup>240</sup> Serta menurut *Media Fact Sheet* ASEAN-India dalam AEM ke 40,<sup>241</sup> perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan India ini akan melengkapi CECA yang telah dilakukan oleh Singapura dan India. Para eksportir Singapura mampu memanfaatkan kedua kesepakatan itu untuk meraih untung yang maksimum.<sup>242</sup> Tampaknya Singapura menyadari perkembangan sektor jasa dan teknologi informasi dan komunikasi India yang begitu pesat. Singapura merupakan pasar ekspor terbesar produk-produk barang India di ASEAN dan bersama dengan Malaysia dan Thailand, ketiganya merupakan mitra dagang utama India dengan ASEAN.<sup>243</sup>

ASEAN pada periode itu sedang menerapkan kebijakan ekonomi dua arah yaitu penguatan integrasi secara internal dan eksternal. ASEAN, melalui Sekretaris Jendralnya saat itu Ong Keng Yong memaparkan secara jelas bahwa ASEAN menginginkan keterbukaan dari mitra-mitra dagangnya jika ingin membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan organisasi itu. Pada saat itu ASEAN gencar melakukan pembicaraan perdagangan bebas dengan berbagai mitra dagangnya yang merupakan negara-negara kuat di kawasan Asia. ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan investasinya melalui kerjasama yang dilakukan dengan Cina, Jepang, Korea Selatan dan juga India. Waldrick memaparkan bahwa perjanjian perdagangan bebas digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi asing.<sup>244</sup> Hal itu dapat terjadi karena saat ini perjanjian perdagangan bebas tidak lagi hanya mencakup sektor perdagangan barang tetapi juga telah mencakup sektor investasi dan juga jasa, seperti halnya antara ASEAN dan India yang pada akhirnya nanti diharapkan akan berbentuk sebuah kawasan bebas tidak hanya di bidang perdagangan barang

<sup>240</sup> Mohamed Ariff dan Lim Chze Cheen, “ASEAN-India FTA: Issues and Prospects,” dalam *India-ASEAN Economic Relations: Meeting the Challenges of Globalization*, ed. Nagesh Kumar, Rahul Sen dan Mukul Asher (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006), 72.

<sup>241</sup> Ministry of Trade and Industry Singapore, “Media Fact Sheet ASEAN-India FTA,” <http://app.mti.gov.sg/aem/default.asp?id=3069> (diakses pada 16 Maret 2009, pukul 13.10 WIB).

<sup>242</sup> Ministry of Trade and Industry Singapore, *Op. Cit.*

<sup>243</sup> C.S. Kuppuswamy, “India-ASEAN Free Trade Agreement,” (South Asia Analysis Group Paper No. 3364), <http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers34%5Cpaper3364.html>, (diakses pada 20 Agustus 2009 pukul 15.30 WIB).

<sup>244</sup> Andreas Waldkirch, *Op. Cit.*, hlm. 2-3

tetapi juga investasi dan jasa, sebagaimana tercantum dalam FA kerjasama antara keduanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penundaan pencapaian kesepakatan dalam perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang selama lebih dari 6 tahun<sup>245</sup> dipengaruhi oleh perubahan strategi yang dilakukan oleh India dari awalnya *integrative* menjadi *distributive*. Hal itu dibuktikan dengan mengajukan penawaran yang sangat tinggi dan bersikap tertutup atau proteksionis contohnya dalam hal penawaran ROO yang kaku dan Daftar Komoditas Sensitif/Negatif yang terlampaui banyak, serta tarif minyak kelapa sawit yang terlalu tinggi. ASEAN sangat menentang semua itu tetapi tampaknya India ingin mendapatkan keuntungan lebih dari kerugian yang diperoleh ASEAN. Seperti diakui oleh pihak dari Departemen Perdagangan, baik yang terlibat langsung dalam proses perundingan maupun tidak, India merupakan negara yang sangat sulit untuk diajak bernegosiasi, mereka akan membuka pasar di sektor-sektor yang mereka benar-benar kuasai dan kuat seperti di sektor IT dan Kimia (obat-obatan) dan mereka akan sebisa mungkin menutup sektor-sektor yang mereka anggap lemah seperti sektor pertanian.<sup>246</sup> India adalah salah satu negara paling proteksionis di dunia, masuk dalam tiga besar negara paling proteksionis.<sup>247</sup> Sedangkan ASEAN masih tetap bersikap terbuka dengan terus bersedia melanjutkan proses negosiasi, walaupun ada pihak yang menyatakan sikap ASEAN terlalu kaku, hal itu tidak lebih dari keinginan ASEAN agar mitra negosiasi nya yaitu India bersikap lebih terbuka dalam perundingan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ASEAN masih menerapkan strategi *integrative*.

Sedangkan dari faktor domestik, tekanan dan lobi dari pihak-pihak berkepentingan seperti pengusaha, petani dan bahkan dari internal partai diindikasikan telah menyebabkan pemerintah India bertindak sedikit tertutup dalam tahap negosiasi dengan ASEAN. Milner dan Yoffie<sup>248</sup> serta Balaam dan

---

<sup>245</sup> C. S. Kuppuswamy, *Op. Cit.*,

<sup>246</sup> Donna Gultom, diwawancara oleh penulis, 22 November 2009, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, catatan tertulis.

<sup>247</sup> Martua Sihombing, diwawancara oleh penulis, 22 November 2009, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, alat perekam.

<sup>248</sup> Helen V. Milner and David B. Yoffie, *Op. Cit.*

Veseth<sup>249</sup> memamparkan bahwa tekanan dan lobi dari pihak-pihak berkepentingan mampu memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Tekanan politik dari pihak koalisi pun tidak kurang besarnya ketika Partai Kongres harus berkoalisi dengan Partai Komunis yang secara terang-terangan menentang perdagangan bebas. Namun ketika Partai Komunis memutuskan untuk keluar dari koalisi maka tampaknya saat itu juga India mampu bersikap lebih kooperatif. Sehingga dapat dikatakan sisi domestik India yang kurang kondusif telah memengaruhi sikap India dalam bernegosiasi. Dari sisi ASEAN, Singapura terus mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk tetap melakukan proses negosiasi dengan India walaupun ASEAN sempat mengancam akan menunda proses negosiasi.

### 3.3 Tahap Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Barang, periode 2008-2009

Setelah tercapai kesepakatan dalam perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang, proses penandatanganan kesepakatan itu pun terus tertunda, pada awalnya kesepakatan ini akan ditandatangani pada bulan Desember 2008 di Thailand, namun tertunda akibat kondisi politik domestik Thailand yang tidak kondusif.<sup>250</sup> Akhirnya direncanakan kembali untuk ditandatangani pada bulan Maret 2009 (*ASEAN Summit*), namun akhirnya tidak terlaksana kembali.<sup>251</sup> Penandatanganan kesepakatan dijadwalkan ulang kembali secepatnya bulan April 2009 lalu (*ASEAN & Dialogue Partners Summit* atau *EAS*) namun tertunda kembali untuk ketiga kalinya. Pada minggu ke dua atau pertengahan Mei 2009 ke dua belah pihak bertemu kembali dalam pembahasan tahap akhir perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang sebelum ditandatangani nantinya. Dan jika tidak ada halangan berarti maka bulan Agustus 2009 nanti perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India di bidang perdagangan barang akan

<sup>249</sup> David N. Balaam dan Michael Veseth, Op. Cit., hlm. 107.

<sup>250</sup> Reuters India, "ASSOCHAM Seeks Early India-ASEAN Pact to Boost Trade," <http://in.reuters.com/article/businessNews/idINIndia-38359120090305>, (diakses pada 23 Maret 2009, pukul 12.10 WIB).

<sup>251</sup> Bernama "Call To Hasten Indo-Asean FTA To Face Global Recession," <http://www.bernama.com/bernama/v5/newsbusiness.php?id=394462>, (diakses pada 20 April 2009, pukul 14.35 WIB).

ditandatangani,<sup>252</sup> bahkan menurut beberapa pihak perjanjian ini baru dapat ditandatangani pada bulan Oktober 2009.<sup>253</sup>

Dari sisi proses perundingan, penundaan-penundaan itu disebabkan karena ASEAN dan India setelah secara prinsip menyepakati perjanjian di bidang perdagangan barang, kedua belah pihak belum mampu menyelesaikan beberapa hal yaitu seperti penyusunan PSR<sup>254</sup>, kerangka waktu dan juga sistem baru penurunan tarif.<sup>255</sup> Pasal demi pasal perjanjian membutuhkan waktu pembahasan yang lama, dan India dalam membentuk FTA dengan ASEAN adalah seperti membuat kesepakatan atau berunding dengan sepuluh negara yang masing-masing negara memiliki tuntutannya masing-masing.<sup>256</sup>

Penurunan tarif tahap pertama yang seharusnya dimulai pada Januari 2009, diundur menjadi Juni 2009 dengan batas akhir tahap pertama tidak berubah sesuai jadwal semula yaitu Desember 2012.<sup>257</sup> Selain mengajukan kerangka waktu baru, pihak India menginginkan agar penurunan tarif dijalankan dalam jangka waktu sembilan tahun dan dalam tiga tahap penurunan tarif, sedangkan pihak ASEAN menginginkan penurunan tarif dalam dua tahap.<sup>258</sup> ASEAN menginginkan penurunan tarif barang sebanyak dua kali dalam jangka waktu dua belas (12) bulan, dimulai sejak kesepakatan ditandatangani, dengan alasan bahwa penurunan tarif seharusnya telah dimulai Januari 2009 yang lalu dan penurunan tarif tahap kedua dapat dilaksanakan pada Januari 2010 sesuai jadwal.<sup>259</sup> Tampaknya pihak India kurang setuju dengan sistem itu dan menginginkan agar dalam jangka waktu 12 bulan tarif hanya diturunkan satu kali saja,<sup>260</sup> yang berarti penurunan tarif akan dimulai tahun 2010. Akibat perbedaan-perbedaan itulah diindasikan mengapa perjanjian perdagangan bebas baru dapat ditanda-tangani Agustus lalu. Akhirnya,

<sup>252</sup> Ahmad Tirmiko Indra, External Economic Relations Division Staff, ASEAN Secretariat. 19 Mei 2009 pukul 10.00-11.00, Via E-mail.

<sup>253</sup> Bussiness Standard, "India, Asean Resolve differences over FTA," <http://www.business-standard.com/india/news/india-asean-resolve-differences-over-fta/359403/>, (diakses pada 28 Mei 2009, pukul 19.00 WIB).

<sup>254</sup> Hasil wawancara dengan Nina Laraswati, *Op. Cit.*

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> Martua Sihombing, *Op.Cit.*

<sup>257</sup> Mint, The Wall Street Journal, "A Free Trade Deal Gone Awry," <http://www.livemint.com/2009/02/19230030/A-free-trade-deal-gone-awry.html?h=B>, (diakses pada 23 Mei 2009, pukul 21.00 WIB).

<sup>258</sup> *Ibid.*

<sup>259</sup> "India, Asean Resolve Differences Over FTA," *Op. Cit.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

ASEAN mengikuti keinginan India untuk hanya menurunkan tarif sebanyak satu kali dalam 12 bulan.

Permasalahan selanjutnya adalah transposisi penggunaan *Harmonized System* (HS),<sup>261</sup> dari HS 2002 menjadi HS 2007. India melakukan perubahan penggunaan HS 2002 menjadi HS 2007 dalam jadwal penurunan tarif nya.<sup>262</sup> Dampak dari transposisi HS tersebut adalah, *pertama*, berubahnya tarif dasar (atas setiap komoditas) yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga memerlukan penyesuaian kembali dan hal itu memakan waktu.<sup>263</sup> *Kedua*, akibat berubahnya tarif dasar tersebut maka kategori-kategori yang telah ditetapkan sebelumnya terhadap tariff-lines tertentu pun berubah dan cenderung mengarah ke arah yang lebih konservatif jika dibandingkan pada saat menggunakan HS 2002.<sup>264</sup>

Setelah India merubah atau mentransposisi penggunaan HS, dari HS 2002 menjadi HS 2007, pada pertemuan ke-22 ASEAN-India TNC, bulan Mei 2009 di Malaysia disepakati bahwa tujuh negara ASEAN pun mentransposisi HS nya menjadi HS 2007 yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura dan Thailand (lihat Lampiran untuk lebih lengkap).<sup>265</sup> Sementara itu Brunei, Myanmar dan Vietnam akan tetap menggunakan HS 2002 untuk sementara waktu. Proses perubahan dari HS 2002 menjadi HS 2007 memakan waktu yang tidak sebentar karena membutuhkan proses verifikasi dan penyesuaian dengan kerangka waktu penurunan tarif yang telah disepakati.<sup>266</sup>

Pada pertemuan ke-15 SEOM-India Consultations, India menyatakan komitmennya untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada bulan Agustus 2009, hingga dilangsungkannya SEOM ini (bulan Juli 2009) seluruh dokumen perjanjian telah mencapai tingkat kabinet dan diharapkan sebelum pelaksanaan AEM-India *Consultations* bulan Agustus 2009 dokumen itu telah mendapat persetujuan kabinet dan parlemen India (lihat Lampiran untuk lebih

<sup>261</sup> *Harmonized System*: Sistem pengklasifikasian produk-produk dengan menggunakan nomor, biasanya terdiri dari enam digit, dibuat oleh World Customs Organization (Sumber: WTO, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/tariffs\\_e/tariff\\_data\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm)).

<sup>262</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "*ASEAN Secretariat Information Paper, Progress Report of the ASEAN-India FTA Negotiations, Op. Cit.*

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "Laporan Pertemuan ke-22 ASEAN-India Trade Negotiating Committee tanggal di Kuala Lumpur, Malaysia, 21-22 Mei 2009.

<sup>266</sup> *Ibid.*

lengkap).<sup>267</sup> Penandatanganan perjanjian ini pun hampir tertunda kembali ketika pihak India menyatakan keberatannya untuk bertemu dengan pihak ASEAN jika pertemuan itu dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus, jadwal penandatanganan yang pada awalnya ditawarkan oleh ASEAN kepada India (lihat Lampiran untuk lebih lengkap).<sup>268</sup> India bagaimanapun juga telah berkomitmen untuk menandatangani perjanjian itu maksimal pada Oktober 2009.<sup>269</sup>

Menilik kondisi domestik India pada periode ini, bulan April-Mei 2009 negara itu mengadakan pemilihan umum (pemilu), pemerintah yang berkuasa tentu tidak akan mengambil keputusan yang gegabah menjelang pemilu antara lain dengan melakukan pembenaran menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain di saat kondisi industri dalam negeri negara itu sedang terpuruk.<sup>270</sup> Sehingga kemungkinan besar keputusan mengenai penandatanganan perdagangan bebas dengan ASEAN baru akan ditandatangani oleh India setelah Pemilu dan pemerintahan baru India terbentuk.<sup>271</sup> Seperti yang diutarakan oleh pejabat tinggi Kementerian Perdagangan India mengutip pernyataan Perdana Menteri Manmohan Singh, *“Prime Minister has put an embargo on signing of any new FTAs or other trade agreements till a new government is in place.”*<sup>272</sup> Perdana Menteri Manmohan Singh akan menunda semua penandatanganan FTA, termasuk antara India dan ASEAN hingga pemilu usai pertengahan Mei 2009 dan pemerintahan yang baru terbentuk. Pernyataan ini menguatkan keyakinan bahwa tertundanya penandatanganan FTA di Thailand April lalu bukanlah hanya karena kondisi yang tidak kondusif di Thailand, tetapi lebih dikarenakan India tidak ingin menandatangani sebelum pemerintahan baru terbentuk.

<sup>267</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, “Laporan Pertemuan SEOM ke-3, di Makati City, the Philippines”, 13-14 Juli 2009.

<sup>268</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, “Summary Record of the Third Meeting of the ASEAN Senior Economic Officials for the Fortieth ASEAN Economic Ministers Meeting, di Makati City, the Philippines,” 13-14 Juli 2009.

<sup>269</sup> *Ibid.*

<sup>270</sup> Asit Ranjan Mishra, “Downturn May Force India to Postpone Trade Pact With Asean,” (Mint, The Wall Street Journal), <http://www.livemint.com/2009/02/18234149/Downturn-may--force-India-to-p.html>, (diakses pada 23 Juni 2009 pukul 17.35 WIB).

<sup>271</sup> Lilian Budianto, “India postpones FTA with ASEAN,” (The Jakarta Post), <http://www.thejakartapost.com/news/2009/03/10/india-postpones-fta-with-asean.html>, (diakses pada 23 Maret 2009, pukul 11.10 WIB).

<sup>272</sup> Mint, The Wall Street Journal, “PM Asks Ministries Not To Sign FTAs Till New Govt Takes Office,” <http://www.livemint.com/2009/03/10151916/PM-asks-ministries-not-to-sign.html?d=1>, (diakses pada 15 Maret 2009, pukul 20.30 WIB).

Pada tanggal 22 Mei 2009, Perdana Menteri India Manmohan Singh terpilih kembali untuk menduduki posisinya untuk yang kedua kalinya. Pemerintahan India yang baru harus terbentuk pada tanggal 2 Juni 2009. Diyakini bahwa dengan terpilihnya Manmohan Singh sebagai PM dan mayoritas kursi yang didapatkan oleh Partai Kongres maka Singh mampu secara lebih leluasa menjalankan reformasi ekonomi seperti dalam sektor investasi dan keterbukaan pasar.<sup>273</sup>

Selain karena menunggu terbentuknya pemerintahan baru di India, tertundanya penandatanganan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-India dikarenakan penurunan perekonomian dunia pada pertengahan tahun 2008. Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, dirasakan oleh India, dengan menurunnya kinerja ekspor India sebesar 1,1% pada Desember 2009 dibandingkan bulan sebelumnya, akibat penurunan ekspor itu, lima ratus ribu orang telah kehilangan pekerjaan mereka.<sup>274</sup> Dengan kondisi demikian akan sangat sulit bagi pemerintah India untuk menandatangani suatu perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain termasuk ASEAN.

Namun ada beberapa pihak di India yang menyarankan sebaliknya, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India sebaiknya dipercepat untuk mencegah proteksionisme dan menurunnya daya serap pasar di AS dan Eropa akibat resesi global.<sup>275</sup> Senada dengan hal itu, Martua Sihombing, menyatakan bahwa sebenarnya India mulai membuka pasar ketika terjadi krisis pada tahun 2008,<sup>276</sup> tampaknya krisis ekonomi telah mendorong India untuk segera membuka pasar dengan mitra dagangnya di wilayah Asia.

Dari sisi ASEAN, ketidakstabilan politik Thailand sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan diindikasikan merupakan penyebab lain tertundanya pertemuan, ketidakstabilan politik domestik negara itu menyebabkan penyelenggaraan pertemuan tidak dapat berjalan lancar, bahkan pada April 2009 lalu para pemimpin ASEAN sendiri gagal untuk bertemu akibat kerusuhan di tempat pelaksanaan. Tawaran dari Indonesia untuk menjadi tuan rumah

---

<sup>273</sup> "Singh Dilantik Jadi PM India," *Kompas* edisi 23 Mei 2009.

<sup>274</sup> Asit Ranjan Mishra, *Op. Cit.*

<sup>275</sup> Bernama, "Call To Hasten Indo-Asean FTA To Face Global Recession," *Op. Cit.*

<sup>276</sup> Martua Sihombing, *Op. Cit.*

penyelenggaraan ASEAN *Summit* ataupun EAS tampaknya ditolak oleh Thailand, karena ini menyangkut hal yang sensitif disebabkan tampuk kepemimpinan ASEAN saat ini dipegang oleh Thailand.

Namun kendala tempat pelaksanaan pertemuan ASEAN dengan para mitranya sebenarnya hanyalah permasalahan yang tidak sedemikian besar jika dibandingkan dengan alasan-alasan penundaan lainnya seperti belum terselesaikannya beberapa isu terkait pemotongan tarif<sup>277</sup>, dan permasalahan domestik di India seperti pemilu yang berlangsung di negara itu, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Terbukti dalam ASEAN Summit ke-14 di Bangkok (27 Februari – 1 Maret 2009), Thailand, ketika ASEAN dan India tidak melakukan penandatanganan kesepakatan perjanjian perdagangan bebas sesuai rencana,<sup>278</sup> ASEAN melangsungkan penandatanganan kesepakatan FTA dengan beberapa negara sekaligus yaitu dengan Australia dan Selandia Baru, serta dengan Korea Selatan.<sup>279</sup> Selain itu ASEAN juga menandatangani ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dan ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) untuk menunjukkan komitmen mereka untuk membentuk AC pada tahun 2015.<sup>280</sup>

Setelah semua proses pencapaian kesepakatan dan kendala dapat diatasi baik dari sisi masing-masing pihak maupun antar kedua belah pihak,<sup>281</sup> serta terdapat indikasi bahwa perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang ini mampu mencapai kata sepakat dan ditandatangani karena pihak ASEAN yang melunak dan lebih banyak mengalah,<sup>282</sup> pada tanggal 21-22 Mei

<sup>277</sup> Business Standard, "India-Asean Trade Pact To Wait," <http://www.business-standard.com/india/news/india-asean-trade-pact-to-wait/354279/>, (diakses pada 2 Agustus 2009, pukul 21.30 WIB).

<sup>278</sup> *The Economic Times*, "ASEAN-India Free Trade Agreement Depends on Thailand," [http://economictimes.indiatimes.com/ASEAN\\_India\\_FTA\\_relies\\_on\\_Thailand/rssarticleshow/4032956.cms](http://economictimes.indiatimes.com/ASEAN_India_FTA_relies_on_Thailand/rssarticleshow/4032956.cms), (diakses pada 20/03/2009, pukul 22.05 WIB).

<sup>279</sup> 14<sup>th</sup> ASEAN Summit, "Outcome Documents: 14<sup>th</sup> ASEAN Summit 27 February-1 March 2009," [http://www.14thaseansummit.org/document\\_main.php](http://www.14thaseansummit.org/document_main.php), (diakses pada 15/03/2009, pukul 20.30 WIB).

<sup>280</sup> Lilian Budianto, *Op. Cit.*

<sup>281</sup> Gulfan Afero, Kepala salah satu bidang di Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Indonesia, diwawancara oleh penulis, pada tanggal 30 September 2009, pukul 12.00-13.00, alat perekam.

<sup>282</sup> Donna Gultom, *Op. Cit.*

2009 dalam Pertemuan ke-22 ASEAN-India TNC di Kuala Lumpur, Malaysia,<sup>283</sup> bertepatan dengan terpilihnya kembali Manmohan Singh sebagai Perdana Menteri India, ASEAN dan India berhasil menyelesaikan draft dokumen-dokumen terkait perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang. Dokumen-dokumen tersebut yaitu kesepakatan terkait perdagangan barang protokol perubahan persetujuan, penyelesaian sengketa dan dokumen tentang Pasal 4 kesepakatan perdagangan barang, Pada pertemuan itu pula masing-masing pihak, negara-negara anggota ASEAN dan India sepakat untuk menyiapkan dokumen yang dinamakan dokumen *full power* sebelum tanggal pelaksanaan penandatanganan dan dokumen itu akan dipertukarkan sebelum proses penandatanganan.<sup>284</sup>

Dan pada tanggal 13 Agustus 2009 dalam AEM-India *Consultations* ketujuh di Bangkok, Thailand, kedua belah pihak ASEAN dan India menandatangani dokumen-dokumen itu yaitu: a. perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang (*Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India*);<sup>285</sup> b. *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India*; c. *Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India*; dan, d. *Understanding on Article 4 of the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India*.<sup>286</sup> Namun hingga bulan Agustus 2009 dari pihak ASEAN, Vietnam menjadi negara satu-satunya nya yang belum menandatangani dokumen *Agreement on trade in goods* dan *Understanding on Article 4 of the Agreement on Trade in Goods*, hal itu terjadi karena India belum mendapatkan persetujuan secara domestik untuk membuka akses pasarnya bagi

<sup>283</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Pertemuan ke-22 ASEAN-India Trade Negotiating Committee tanggal di Kuala Lumpur, Malaysia, Op. Cit.*

<sup>284</sup> *Ibid.*

<sup>285</sup> ASEAN Sekretariat, "Joint Statement of The Seventh AEM-India Consultations," <http://www.aseansec.org/22563.htm>, (diakses pada 20 September 2009 pukul 13.05 WIB).

<sup>286</sup> ASEAN Sekretariat, "ASEAN-India Free Trade Area," <http://www.aseansec.org/22563.htm>, (diakses pada 20 September 2009 pukul 12.50 WIB).

Vietnam (lihat Lampiran untuk lebih lengkap).<sup>287</sup> Secara keseluruhan membutuhkan waktu satu tahun untuk menandatangani perjanjian yang telah disepakati secara prinsip oleh ASEAN dan India pada Agustus 2008 dan enam tahun semenjak FA ditandatangani tahun 2003.

Isi atau *modalities* yang baru ditandatangani tidak memiliki perubahan kecuali tentunya kerangka waktu yang ditetapkan, karena perjanjian perdagangan barang ini baru ditandatangani Agustus 2009 sehingga tentunya kerangka waktu yang diterapkan pun berubah. Isi perjanjian perdagangan bebas ini terdiri dari 5 kategori yaitu:

- 1) Jalur Normal,
- 2) Jalur Sensitif,
- 3) *Special Products* atau HST,
- 4) Daftar Komoditas Sangat Sensitif (*Highly Sensitive List*), dan
- 5) Daftar Komoditas Pengecualian (*Exclusion List*).<sup>288</sup>

Isi dari Kesepakatan Perdagangan Barang AIFTA yang baru ditandatangani adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Jalur Normal 2009**

Jalur Normal	ASEAN 5 & India	Filipina & India	CLMV & India
71% <i>tariff lines</i> & 72% nilai impor (NT1)	31.12.2013	31.12.2018	31.12.2018
9% <i>tariff lines</i> & 3% nilai impor (NT2)	31.12.2016	31.12.2019	31.12.2021

Sumber: Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN-India," [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), (diakses pada 22 Oktober 2009, pukul 22.35 WIB).

<sup>287</sup> Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Perkembangan Terakhir ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)*, 24 Agustus 2009.

<sup>288</sup> ASEAN Sekretariat, "Annex 1, *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India*," <http://www.aseansec.org/22563.htm>, (diakses pada 20 September 2009 pukul 13.00 WIB).

Untuk jalur normal seperti Tabel 3.4 di atas, penurunan tarif untuk Jalur Normal 1 (NT1) akan dimulai (*entry into force*) pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2013 bagi ASEAN 5, sedangkan untuk Filipina akan berakhir Desember 2018, begitu pula halnya untuk negara-negara CLMV (*Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam*).<sup>289</sup> Sedangkan untuk Jalur Normal 2 (NT2) akan dimulai pada tanggal yang sama dengan jalur pertama dan akan berakhir tahun 2016 untuk ASEAN5, 2019 untuk Filipina, dan 2021 untuk negara-negara CLMV. Jadwal dimulai dan berakhirnya penurunan tarif diundur satu tahun dari jadwal yang ditetapkan semula. Sebagai catatan tambahan, jika tarif yang ditetapkan telah 0% maka tarif itu akan tetap 0%, dan jika suatu tarif telah diturunkan menjadi 0% maka tarif itu akan tetap 0%, masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk menaikkan tariff dari suatu komoditas. *Tariff lines* atau komoditas yang akan dihapus dalam Jalur Normal ini mencakup 80% dari total komoditas yang diperdagangkan ASEAN dan India atau sekitar 4000 komoditas. Dari total 4000 komoditas itu, sebanyak 3200 komoditas atau 71% nya akan dihapus pada tahun 2013 atau masuk dalam NT1, dan 800 komoditas lagi atau 9% akan dihapus pada tahun 2016.<sup>290</sup>

Jadwal penurunan tarif untuk NT1 secara lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 3.5 di bawah ini:

---

<sup>289</sup> ASEAN Sekretariat, Annex 1, *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India*, *Op. Cit.*

<sup>290</sup> C.S. Kuppuswamy, *Op. Cit.*

Tabel 3.5 Jadwal penurunan tarif NT1

ASEAN-5 to India and India to all ASEAN Member Countries, except the Philippines											
Cuts	On	$x > 30$	$x = 30$	$20 < x < 30$	$x = 20$	$15 < x < 20$	$x = 15$	$10 < x < 15$	$x = 10$	$5 < x < 10$	$x \leq 5$
1st Cut	1.1.2010	30	25	20	15	15	12.5	10	7.5	5	4
2nd Cut	1.1.2011	20	20	15	12.5	10	10	7.5	5	5	3
3rd Cut	1.1.2012	10	10	10	10	7.5	7.5	5	5	2.5	2
4th Cut	1.1.2013	5	5	5	5	5	5	2.5	2.5	2.5	0
5th Cut	31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN-India," [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), (diakses pada 22 Oktober 2009 pukul 22.35 WIB).

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, jadwal penurunan tarif untuk tarif *Most Favoured Nation* (MFN)<sup>291</sup> komoditas yang berada di atas 30% (x diasumsikan sebagai tarif dasar berdasarkan MFN yang disepakati) maka pada tahun 2010 ditargetkan akan turun hingga 30%, sedangkan untuk tarif yang sudah 30% akan diturunkan menjadi 25%, untuk tariff antara 20% sampai dengan 30% diturunkan hingga 20% dan seterusnya sebagaimana terlihat di dalam tabel. Seluruh tariff yang berada pada NT1 akan diturunkan hingga 0%.

Untuk jadwal penurunan tariff pada Jalur Normal 2 (NT2) adalah sebagai berikut:

<sup>291</sup> Tarif *Most Favoured Nation* : tarif normal suatu negara yang dikenakan terhadap produk negara lain sesama anggota WTO (Sumber: WTO, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/tariffs\\_e/tariff\\_data\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm)).

Tabel 3.6 Jadwal penurunan tarif NT2

ASEAN-5 to India and India to all ASEAN Member Countries, except the Philippines											
Cuts	On	x > 30	x = 30	20 < x < 30	x = 20	15 < x < 20	x = 15	10 < x < 15	x = 10	5 < x < 10	x ≤ 5
1st Cut	1.1.2010	30	25	20	17.5	15	13	10	7.5	5	4
2nd Cut	1.1.2011	25	20	17	15	12	11	9	6	4	4
3rd Cut	1.1.2012	20	15	15	12	10	8	8	5	3	3
4th Cut	1.1.2013	15	13	13	10	8	6	6	4	3	3
5th Cut	1.1.2014	12	11	10	7	6	5	5	3	2	2
6th Cut	1.1.2015	8	8	7	5	4	3	3	2	2	2
7th Cut	1.1.2016	5	5	5	3	2	2	2	1	1	1
8th Cut	31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN-India," [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), diakses pada 22 Oktober 2009 pukul 22.35 wib.

Penurunan tarif pada NT2 sama dengan NT1 perbedaan terjadi pada besaran potongan tarif pada pemotongan ke-empat tahun 2013 (disaat pemotongan tariff pada NT1 telah selesai, mencapai 0%), pada NT2 tarif masih dipotong hingga 15% untuk tarif MFN di atas 30% dan akan diturunkan hingga 0% pada tahun 2016.

Sedangkan untuk Jalur sensitif, penurunan tarifnya sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Jalur Sensitif 2009

Jalur Sensitif	ASEAN 5 & India	Filipina & India	CLMV & India
Pengurangan tarif hingga 5%	31.12.2016	31.12.2019	31.12.2021
Penghapusan tarif dari 4% <i>tariff lines</i> yang ada di Jalur sensitif:	31.12.2019	31.12.2022	31.12.2024

Sumber: Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN-India," [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), (diakses pada 22 Oktober 2009 pukul 22.35 WIB).

Kesepakatan atau ketentuan modalities-nya tidak berbeda dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya perbedaan hanya terdapat dalam kerangka waktu seperti terlihat dalam tabel 3.7 di atas. Untuk penurunan tarif hingga 5%, jadwal penurunan secara lebih jelas terlihat dalam table 3.8 di bawah ini:

Table 3.8 Jadwal Penurunan Tarif Jalur Sensitif

ASEAN-5 and India										
Cuts	On	$x > 30$	$x = 30$	$20 < x < 30$	$x = 20$	$15 < x < 20$	$x = 15$	$10 < x < 15$	$x = 10$	$5 < x < 10$
1st Cut	1.1.2010	30	27	20	18	15	14	10	9	6
2 <sup>nd</sup> Cut	1.1.2011	26	24	18	15	13	13	9	8	6
3rd Cut	1.1.2012	23	21	16	13	12	12	8	7	6
4th Cut	1.1.2013	20	18	14	12	11	11	7	7	6
5th Cut	1.1.2014	16	15	12	10	10	10	6	6	5
6th Cut	1.1.2015	13	12	10	8	8	8	6	6	5
7th Cut	1.1.2016	9	8	7	6	6	6	6	5	5
8th Cut	31.12.2016	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN-India," [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), (diakses pada 22 Oktober 2009 pukul 22.35 WIB).

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas terlihat bahwa semua komoditas yang berada pada jalur ini tariff nya akan diturunkan hingga 5%, Namun (tidak ditunjukkan dalam table ini) semua komoditas yang telah memiliki tariff 5% akan tetap dibiarkan 5% hingga akhir waktu kesepakatan, tahun 2016. Jumlah komoditas yang diturunkan tarifnya hingga mencapai 5% berjumlah 500 komoditas.<sup>292</sup>

Untuk 5 produk yang masuk dalam HST atau *special products* yaitu minyak sawit mentah (CPO) dan minyak sawit suling (RPO), kopi, teh hitam, serta lada, *modalities* penurunan tarif nya tetap seperti kesepakatan yang lama, hanya kerangka waktu yang diundur. Secara lebih jelas, kerangka waktu penurunan tarif dari kelima komoditas itu adalah seperti dalam tabel 3.9 di bawah ini:

**Tabel 3.9 Penurunan Tarif Lima Komoditas Spesial**

Tariff Line	Base Rate	AIFTA Preferential Tariffs										31.12.2019
		Not later than 1 January										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
CPO	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	37.5
RPO	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	45
Kopi	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Teh Hitam	100	90	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Lada	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	51	50

Sumber: Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN-India," dalam [http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section\\_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04](http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_54c53554-c0a8156f-2af82af8-64f3ec04), (diakses pada 22 Oktober 2009 pukul 22.35 WIB).

Untuk Daftar Komoditas Sangat Sensitif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu.<sup>293</sup>

<sup>292</sup> Sanjaya Baru, *Op. Cit.*

<sup>293</sup> ASEAN Sekretariat, Annex 1, *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India, Op. Cit.*

- 1) Kategori pertama, penurunan atas komoditas yang *tariff lines* di atas 50% hingga mencapai 50% pada tahun 2019 untuk ASEAN5, 2022 untuk Filipina dan tahun 2024 untuk negara-negara CLMV
- 2) Kategori kedua, penurunan atas komoditas yang *tariff lines*-nya lebih rendah dan sama dengan 50% akan diturunkan berdasarkan margin of preference (MOP) sebesar 50% pada tahun 2019 untuk ASEAN5, 2022 untuk Filipina dan tahun 2024 untuk negara-negara CLMV
- 3) Kategori ketiga, penurunan atas komoditas yang *tariff lines*-nya lebih rendah dan sama dengan 50% akan diturunkan berdasarkan margin of preference (MOP) sebesar 25% pada tahun 2019 untuk ASEAN5, 2022 untuk Filipina dan tahun 2024 untuk negara-negara CLMV.

Sedangkan untuk Daftar Komoditas Pengecualian, jumlah komoditas yang ditetapkan untuk tidak terkena penghapusan tarif tetap berjumlah sama yaitu 489 komoditas (*tariff lines*) yang kesemuanya adalah komoditas pertanian.<sup>294</sup> Berdasarkan dokumen perjanjian perdagangan barang, hampir seluruh komponen pendukung dari perjanjian perdagangan bebas di bidang perdagangan barang telah selesai, termasuk ROO, 54 *Product Specific Rules (PSR)* dan *Dispute Settlement Agreement*.<sup>295</sup>

Perjanjian ini, sesuai dengan kerangka waktu penurunan tarif, akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2010 dengan syarat bahwa Pemerintah India dan salah satu pemerintah dari negara-negara ASEAN telah memberikan notifikasi bahwa perjanjian ini telah diratifikasi.<sup>296</sup> Jika pada tenggat waktu tersebut (1 Januari 2010) salah satu pihak belum dapat menyelesaikan proses ratifikasi di dalam negerinya maka penurunan tarif akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2010 bagi pihak itu. Dan jika hingga tanggal 1 Juni 2010 pihak itu belum juga mampu meratifikasi perjanjian maka tanggal efektif penurunan barang itu akan

<sup>294</sup> Sanjaya Baru, *Op. Cit.*

<sup>295</sup> Ministry of International Trade and Industry Malaysia, "ASEAN-India FTA," *Op. Cit.*

<sup>296</sup> ASEAN Sekretariat, "Press Release: ASEAN and India sign the much awaited Free Trade Area," <http://www.aseansec.org/PR-ASEAN-India-Sign-Much-Awaited-FTA.pdf> (diakses pada 20 September 2009 pukul 19.40 WIB).

ditetapkan sesuai kesepakatan bersama (ASEAN dan India). Hal itu tercantum dalam Pasal 22 tentang *Entry into Force* ayat 1.<sup>297</sup>

*The Parties shall notify each other in writing upon completion of their internal requirements<sup>2</sup> necessary for entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date by which such notifications have been made by India and at least one (1) ASEAN Member State.*

Dan ayat 2:

*Where a Party is unable to complete its internal requirements for the entry into force of this Agreement by 1 June 2010, this Agreement shall enter into force for that Party upon the date of notification of the completion of its internal requirements.*

Disadari bahwa tingkat liberalisasi perdagangan barang dalam AIFTA tidak setinggi tingkat liberalisasi perdagangan barang antar ASEAN dengan mitra dagangnya yang lain, oleh karena itu kedua belah pihak menerapkan sistem atau proses *review* (atas kesepakatan-kesepakatan atau *modalities* yang telah dicapai) setelah perjanjian itu diimplementasikan (lihat Lampiran untuk lebih lengkap).<sup>298</sup>

Setelah menyelesaikan perundingan perdagangan bebas di bidang perdagangan barang, kedua belah pihak memulai perundingan di bidang jasa dan investasi sebagai sebuah kesatuan (*single-undertaking*).<sup>299</sup> Perundingan ini dimulai pada bulan Oktober 2009 hingga diharapkan selesai pada akhir tahun (Oktober) 2010.<sup>300</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa hingga akhir proses perundingan India menerapkan strategi *distributive* dengan selalu berusaha bersikap keras dalam mempertahankan penawarannya, seperti kerangka waktu penurunan tarif, transposisi HS, dan juga jadwal penandatanganan yang

<sup>297</sup> ASEAN Sekretariat, "Annex 1, *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India*," *Op.Cit.*

<sup>298</sup> Departemen Perdagangan, "ASEAN-India Trade in Goods Agreement under ASEAN-India FTA," Bahan Presentasi Departemen Perdagangan.

<sup>299</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "ASEAN Secretariat Information Paper, *Progress Report of the ASEAN-India FTA Negotiations* dalam 14<sup>th</sup> SEOM-India Consultations di Bangkok, Thailand," *Op.Cit.*

<sup>300</sup> Departemen Perdagangan, "ASEAN-India Trade in Goods Agreement under ASEAN-India FTA," *Op. Cit.*

kesemuanya akhirnya mengikuti keinginan India (lihat Gambar 3.1), sehingga terdapat indikasi bahwa akhirnya ASEAN bersikap lebih banyak mengalah.

Kondisi politik domestik India yang tidak kondusif sekali lagi menjadi hambatan dalam penyelesaian perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India. April sampai dengan Mei 2009, India mengadakan pemilihan umum. India secara jelas menyatakan akan menandatangani perjanjian itu setelah pemerintahan baru terbentuk, sebelum itu India tidak akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara atau kawasan manapun termasuk dengan ASEAN. Sebagaimana yang dinyatakan Lentner<sup>301</sup> bahwa kondisi politik dan ekonomi di suatu negara tentunya akan memengaruhi kebijakan luar negeri negara itu. Dari pihak ASEAN, gangguan hanya terjadi pada tempat penyelenggaraan pertemuan yaitu Thailand yang beberapa kali mengalami ketidakstabilan politik sehingga mengganggu rencana pertemuan.

---

<sup>301</sup> Howard H. Lentner, *Op. Cit.*, hlm.191.